

## KUNJUNGI MUNA BARAT, JOKOWI TINJAU PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD BAHARUDDIN



Sumber gambar:

<https://img.okezone.com/content/2024/05/14/337/3008064/kunjungi-muna-barat-jokowi-tinjau-pelayanan-kesehatan-di-rsud-baharuddin-rnSEAPTOaD.jpg>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan serangkaian agenda dalam kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Muna dan Muna Barat, Senin 13 Mei 2024.

Kepala Negara tiba di Muna sekira pukul 09.07 WITA langsung meninjau pelayanan kesehatan di RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes.

“Saya lihat hampir di semua daerah, penyakit yang menonjol itu stroke, jantung. Problemnya kalau di sebuah Kabupaten atau Kota yang jauh dari Provinsi, tidak segera ditangani ya itu akan menjadi problem,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menekankan pentingnya akses terhadap peralatan kesehatan modern guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Sekarang Kementerian Kesehatan banyak mengirimkan CT scan, cath laba, mammogram ke RS Kabupaten/Kota, termasuk alat USG kehamilan di Puskesmas,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sultra.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Baharuddin Muna ini, termasuk RSUD lainnya yang ada di jazirah Sultra” kata Andap.

Kegiatan di Kabupaten Muna dilanjutkan dengan mengunjungi Pasar Sentral Laino Raha. Presiden melakukan dialog langsung dengan pedagang pasar dan meninjau ketersediaan, serta stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok.

Presiden Jokowi pun memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang kaki lima dan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada para pedagang yang ada di Pasar Sentral Laino Raha Muna.

Presiden mengecek stok cadangan beras di Gudang Bulog, dilanjutkan dengan menyalurkan bantuan pangan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Laende, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.

Dalam sambutannya, Presiden memastikan bahwa distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024, dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember 2024, tergantung ketersediaan APBN.

Pj. Gubernur menyampaikan bahwa bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian Presiden kepada masyarakat Muna “Dengan kebijakan ini diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terbantu, ” kata Andap

Sementara itu di Kabupaten Muna Barat Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Rakyat Kambara dan memberikan BMK dan BTL, yang dilanjutkan dengan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) Provinsi Sultra.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden berkenan meresmikan IJD Sultra di Muna Barat, dengan adanya IJD ini kita bersyukur Presiden memberikan perhatian kepada kita disini dalam pembangunan infrastruktur jalan yang akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas,” pungkask Pj. Gubernur.

Sebagai informasi, Provinsi Sultra mendapat alokasi anggaran dari APBN Rp631 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 22 ruas jalan. Total panjang jalan yang dibangun adalah sepanjang 164,8 km. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Sultra, yakni Mensekneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, Sdr Muhammad Qodari, Plt Bupati Muna, dan Pj Bupati Muna Barat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://nasional.okezone.com/read/2024/05/14/337/3008064/kunjungi-muna-barat-jokowi-tinjau-pelayanan-kesehatan-di-rsud-baharuddin?page=all>, ” Kunjungi Muna Barat, Jokowi Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin”, tanggal 14 Mei 2024;

2. <https://news.detik.com/berita/d-7336792/tiba-di-muna-sultra-jokowi-akan-tinjau-rsud-dan-resmikan-jalan>, “Tiba di Muna Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan”, tanggal 13 Mei 2024.

**Catatan:**

- Dengan adanya RSUD Baharuddin pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil dapat lebih optimal.
- Terkait Pendapatan APBD diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
    - a. Pasal 3
      - 1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
      - 2) Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      - a. Pasal 1
        - 1) Angka 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
        - 2) Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.